



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I SISTEM PERADILAN PIDANA	1
A. Sistem Peradilan Pidana	1
B. Sistem Inquisitorial	4
C. Sistem Adversarial	6
D. Dikotomi Konsep Adversarial dan Inquisitorial	10
E. Model Sistem Peradilan Pidana (<i>Crime Control Model</i> dan <i>Due Process Model</i>)	12
BAB 2 SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA	19
A. Sebelum dan pada Saat Zaman Kolonial	19
B. Setelah Kemerdekaan	27
C. Setelah Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951	28
D. Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981	29
E. Rancangan Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	32

BAB 3	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	39
A.	Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan	39
B.	Penyelidik dan Penyidik	42
C.	Kewenangan Penyelidik, Penyidik, Penyidik Pembantu dan Penyidik PPNS	44
D.	Penyelidik dan Penyidik di Luar Polri	47
E.	Koordinasi Penyelidik dan Penyidik Polri Dengan Penyidik PPNS dan Penyelidik dan Penyidik di Luar Polri	49
F.	Proses Penyelidikan dan Penyidikan	52
G.	Beberapa Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Penyidikan	67
BAB 4	UPAYA PAKSA	73
A.	Pendahuluan	73
B.	Penangkapan	74
C.	Penahanan	84
D.	Pengeledahan	91
E.	Penyitaan	95
F.	Pemeriksaan Surat	100
G.	Penyadapan	100
BAB 5	PENUNTUTAN	111
A.	Peran dan Fungsi Penuntut Umum	111
B.	Prapenuntutan	113
C.	Surat Dakwaan	124
D.	Penggabungan dan Pemisahan Berkas Perkara	127
E.	Pelimpahan Perkara	129
F.	Penghentian Penuntutan	131
G.	Penghentian/Pengenyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum	133
BAB 6	LEMBAGA PRAPERADILAN	141
A.	Sejarah Pengaturan Praperadilan di dalam KUHAP	141

B.	Kewenangan Lembaga Praperadilan di Indonesia	143
C.	Acara Pemeriksaan Praperadilan	151
D.	Konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan di dalam Rancangan KUHAP Sebagai Pengganti Lembaga Praperadilan	153
E.	Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	158
BAB 7	EKSEPSI DALAM HUKUM ACARA PIDANA	167
A.	Pengertian Eksepsi	167
B.	Jenis-jenis Eksepsi	168
BAB 8	KOMPETENSI (KEWENANGAN MENGADILI) BADAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	179
A.	Kompetensi Absolut Badan Peradilan di Indonesia	179
B.	Kompetensi Relatif	180
C.	Kompetensi Relatif Peradilan Umum untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Suatu Perkara Pidana	181
D.	Kewenangan Mengadili Bagi Pengadilan Tinggi	192
E.	Sengketa Kewenangan Mengadili	192
BAB 9	HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA, PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI/KORBAN DAN PIHAK-PIHAK YANG MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA	197
A.	Hak-hak Tersangka/Terdakwa	197
B.	Perlindungan Saksi dan Korban	216
C.	Perlindungan Bagi Pihak-pihak yang Membantu Mengungkap Tindak Pidana	228
BAB 10	ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PIDANA	243
A.	Acara Pemeriksaan Biasa	244
B.	Acara Pemeriksaan Singkat (<i>Summiere Procedure</i>)	252
C.	Acara Pemeriksaan Cepat	255
D.	Diversi	261
E.	Video Conference (Teleconference)	265

BAB 11	SISTEM PEMBUKTIAN	273
	A. Pendahuluan	273
	B. Teori-teori Mengenai Sistem Pembuktian	274
	C. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	281
	D. Pembalikan Beban Pembuktian (<i>Reverse Burden of Proof</i>)	283
	E. Penerapan <i>Exclusionary Rules</i> di Indonesia	288
BAB 12	ALAT BUKTI	295
	A. Pendahuluan	295
	B. Jenis Alat Bukti Menurut KUHAP	298
BAB 13	PUTUSAN DAN EKSEKUSI	323
	A. Pendahuluan	323
	B. Penetapan	324
	C. Putusan Pidana	327
	D. Putusan Bukan Pidana	329
	E. Eksekusi Putusan	332
	F. Hakim Pengawas Pengamat (Hakim Wasmat)	340
BAB 14	UPAYA HUKUM	347
	A. Pendahuluan	347
	B. Jenis-jenis Upaya Hukum	350
	C. Perlawanan	370
	DAFTAR PUSTAKA	375
	INDEKS	379
	BIODATA PENULIS	385